

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu : Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka melakukan upaya diatas, maka diperlukan tata kelola keuangan yang baik (good and clean governance) yang dilakukan oleh pemerintah. KPPN adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konsep peran dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai kedudukan tertentu.

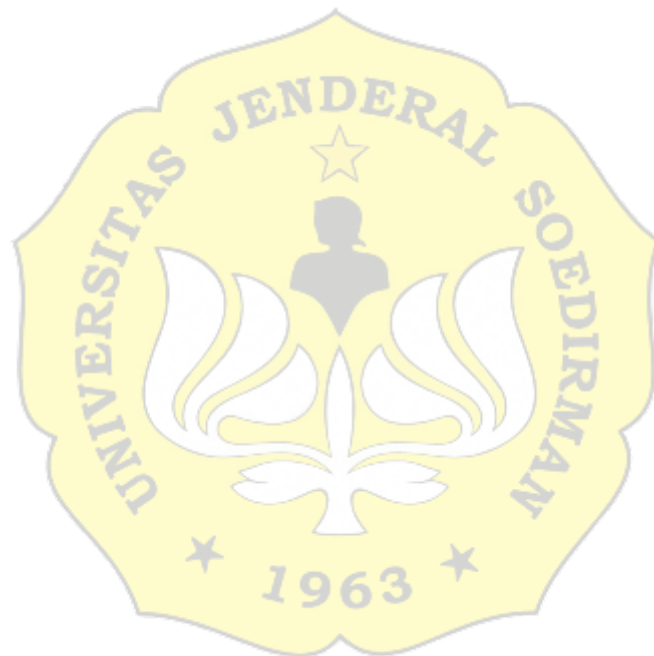
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti hukum kepustakaan, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analitis (*Analitical Approach*), berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendiskripsikan keseluruhan dan sistematika mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan lain yang terkandung didalam permasalahan yang dibahas. Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah observasi, interview, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam tata kelola keuangan yang baik sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) yang melaksanakan tugas perbendaharaan negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. KPPN Pekalongan mengelola keuangan negara dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:
 - a. Perencanaan anggaran, diawali dengan satuan kerja (satker) pada kementerian/lembaga menjabarkan pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan kementerian keuangan dan bappenas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Data tersebut yang sudah disetujui oleh unit eselon I untuk menyusun anggaran selanjutnya direktorat jenderal anggaran (DJA) menelaah data yang telah disetujui kemudian dicetak menjadi himpunan dan lampiran nota keuangan yang kemudian disampaikan ke DPR bersama RUU APBN untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi UU APBN.
 - b. Pelaksanaan anggaran, pelaksanaan yang diikuti dengan proses pencairan dana dari masing-masing kementerian di dirjen keuangan untuk kegiatan pemerintahan. Mekanisme pelaksanaan : KPPN melakukan validasi, review dan persetujuan terhadap resume tagihan sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran. Setelah KPPN melaksanakan review dan verisikasi

terhadap SPM, kemudian menyetujui SPM dengan menerbitkan surat persetujuan tagihan (SPPT).

c. Pertanggung jawaban, Satker menyusun laporan keuangan bulanan yang kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Satker akan menyampaikan laporan keuangan hasil rekonsiliasi ke tingkat kanwil, kantor pusat eselon 1 dan biro keuangan kementerian/lembaga melalui SAKTI.



ABSTRACT

The background of this research is that indonesia has some of the objectives listed in the constitution of the republic of indonesia in 1945 as contained in the fourth paragraph of the preamble of the 1945 constitution, namely: To promote general welfare and educating the nation. In order to perform the above effort, it is needed a good financial management (good and clean governance) undertaken by the government. State treasury service office (KPPN) is one of the government agencies that have a very important role in moving the national economy in the field of state budget (APBN). The role concept can be defined as expected someone behavior of having a certain position.

The method of this research used normative juridical approach or legal research that only examined legal literature, statute approach, and analytical approach. This research was a descriptive analysis research that illustrated or described the overall and systematic principles of the law, rules and other regulations contained in the problem discussed. This research was conducted at the state treasury service office pekalongan. The method used to collect data were observation, interview, and documentation.

Based on the results of research and discussion of the data obtained, it can be concluded:

1. That the role of the ministry's Office of the State Treasury in good financial governance as General Treasurer (BUN) which carries out the state treasury, the finance portfolio at the expense of the budget, as well as the administration budget revenues and expenditures through the state treasury by the legislation.
2. KPPN Pekalongan manage state finances is done through three stages, namely:
 - a. Budget planning, starting with the work units (work units) at the ministry / agency lays out the budget ceiling and the budget allocation established Ministry of Finance and Bappenas in the Work Plan and Budget Ministry / Agency (RKA-K / L) through Application System Financial Institutions (MAGIC). The data that has been approved by the unit echelon to prepare the next budget directorate general of budget (DJA) to examine the data that has been approved is then molded into the financial memorandum sets and attachments are then submitted to the Parliament and state budget bill to be discussed and determined to be the State Budget Law.
 - b. Budget implementation, the implementation of which is followed by the release of funds from individual ministries in the financial directorate general for government activities. The mechanism of implementation: KPPN perform validation, review and approval to resume the bill as the basis for applying for a payment request. After carrying out a review and verisikasi KPPN the SPM, then approved SPM by issuing a letter of approval the bill (SPPT).
 - c. Accountability, PIU prepare monthly financial reports which are then to be reconciliation with the Treasury Office. Satker will submit financial statements to the level of the reconciliation provincial offices, headquarters and agencies echelon 1 financial ministries / agencies through MAGIC.